

PELATIHAN PENGUATAN DAYA SAING BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN TAMANSARI KABUPATEN BOGOR

Herman, Dion Ahmad Armadi
Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan, Bogor
herman_fhz@unpak.ac.id

Abstract

This Community Service Activity (PKM) aims to improve the ability of BUM Desa administrators in managing their organizations, because so far there are still many BUM Desa that have not developed due to the lack of management capabilities in running their organizations. This activity is intended for the heads and administrators of BUM Desa in Bogor Regency. The method of implementation is to identify the problem first through an analysis tool using the SWOT method. Based on the results of the SWOT analysis, the activities carried out were organizational management training for the heads and administrators of BUM Desa which was carried out by the author with the initial stage being carried out for the chairman and management of BUM Desa in Tamansari Subdistrict, Bogor Regency. The implication of this Community Service (PKM) activity is the increasing ability of BUM Desa administrators in managing the organization and ultimately creating a professional and competitive BUM Desa organization.

Keywords: analysis; bumdesa; competitiveness; dedication; training;

Abstrak

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus BUM Desa dalam mengelola organisasinya, dikarenakan selama ini masih banyak BUM Desa yang tidak berkembang dikarenakan kurangnya kemampuan pengurus dalam menjalankan organisasinya. Kegiatan ini ditujukan bagi para ketua dan pengurus BUM Desa yang ada di Kabupaten Bogor. Metode pelaksanaannya adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan terlebih dahulu melalui alat analisis dengan menggunakan metode SWOT. Berdasarkan hasil analisis SWOT maka kegiatan yang dilakukan adalah pelatihan pengelolaan organisasi bagi para ketua dan pengurus BUM Desa yang dilaksanakan oleh penulis dengan tahap awal dilaksanakan untuk ketua dan pengurus BUM Desa se Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Implikasi dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini adalah meningkatnya kemampuan para pengurus BUM Desa dalam mengelola organisasi dan pada akhirnya tercipta organisasi BUM Desa yang profesional dan memiliki daya saing.

Kata Kunci : analisis; bumdesa; daya saing; pelatihan; pengabdian

KETERANGAN ARTIKEL (diisi oleh redaksi)

Riwayat Artikel: diterima: 2 Agustus 2021; direvisi: 14 Agustus 2021; disetujui: 20 Agustus 2021

Copyright©2021. Rudence: Rural Development For Economic Resilience

PENDAHULUAN

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Salah satu faktor yang paling dominan adalah intervensi pemerintah terlalu besar, akibatnya justru menghambat daya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengelola dan menjalankan mesin ekonomi di pedesaan. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian. Berdasarkan asumsi

itulah maka sudah seharusnya eksistensi desa mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat dengan lahirnya kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan dengan cara menghimpun dan melembagakan kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sebagai salah satu program andalan dalam meningkatkan kemandirian perekonomian desa. Pada kenyataannya, meski sudah banyak regulasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, ternyata kesadaran aparatur desa khususnya di Kabupaten Bogor untuk mendirikan lembaga keuangan mikro maupun BUMDesa masih kurang. Selain itu, masih belum pahamnya aparat desa dalam menjalankan mekanisme sistem pengelolaan organisasi bisnis. Hal tersebut yang menjadi kendala. Padahal BUM Desa itu sebagai pilar ekonomi desa. Dalam aturan sudah disebutkan satu desa wajib memiliki satu BUMDesa, yang jenis usahanya apa saja disesuaikan dengan potensi, sumber daya dan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah usaha desa yang dibentuk/ didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat (Wiwoho dan Kholil, 2012). Definisi Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) lebih komprehensif tertera dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) juga dapat didefinisikan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, 2007). Potensi desa dalam hal ini menjadi tolak ukur untuk membuat usaha desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat. Sebagai lembaga pengembangan ekonomi masyarakat desa, BUMDesa memiliki beberapa tujuan. Tujuan pendirian BUMDesa adalah meningkatkan pendapatan asli desa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, dan menciptakan lapangan kerja. Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan dari 416 desa baru 282 yang memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), masih ada 134 Desa belum memiliki BUMDesa. Dari 282 BUMDesa tersebut dapat di kategorikan sebagai berikut :

Tabel 1 : Data BUMDesa di Kabupaten Bogor

Tahun	Jumlah Desa	Jumlah BUMDesa	Status Aktif	Status Non Aktif	Kategori			
					Dasar	Berkembang	Maju	Mandiri
2016	416	201	98	103	190	10	1	0
2017	416	249	127	122	238	10	1	0
2018	416	282	161	121	148	11	2	0

Sumber : DPMD Kabupaten Bogor (2018)

Keberadaan BUMDesa ini sangat penting agar ekonomi di desa tersebut dapat berkembang dan mandiri. Meski sudah banyak regulasi terkait upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan desa, ternyata kesadaran aparatur desa di Kabupaten Bogor untuk mendirikan lembaga

keuangan mikro maupun BUMDesa masih kurang. Berbagai upaya pemerintah pusat maupun daerah yang bertujuan agar ekonomi dapat berkembang dan mandiri tapi belum juga dimaksimalkan. Apalagi dalam UU No 6/2014 tentang Pengguna Dana Desa itu sudah berjalan tiga tahun, tapi penggunaannya oleh desa-desa di Kabupaten Bogor lebih terfokus pada fisik, tapi ke pemberdayaan masyarakatnya kurang. BUM Desa di Kabupaten Bogor ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi menyimpan potensi dan harapan bagi kehidupan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, di sisi yang lain BUM Desa memiliki permasalahan yang pelik. BUMDesa di Kabupaten Bogor memang belum secara maksimal terkelola secara profesional, sehingga sangat rentan pada konflik horizontal. Beberapa permasalahan yang dijumpai di BUMDesa Kabupaten Bogor antara lain: aspek bisnis, terdiri dari produksi, pemasaran, pengembangan usaha. Aspek tata kelola, terdiri dari : administrasi, organisasi dan keuangan. Dari beberapa permasalahan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem tata kelola organisasi pengurus BUMDesa masih kurang, hal ini disebabkan karena kurangnya pengurus BUMDesa mendapatkan pendidikan dan pelatihan. Oleh sebab itu perlu adanya pendampingan yang harus dilakukan oleh kalangan akademisi.

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pendampingan pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang menyebabkan tidak berkembangnya BUM Desa dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan teknik yang berguna untuk memahami Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) organisasi, dan untuk mengidentifikasi baik Peluang (*Opportunities*) yang terbuka untuk organisasi dan Ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh organisasi. Pada dasarnya analisis ini berusaha menemukan peluang baru, mengelola dan mengurangi ancaman organisasi. Setelah ditemukan permasalahan berdasarkan hasil analisis SWOT selanjutnya dilakukan tindakan nyata bersama-sama antara Bum Desa dengan penulis.

INTERNAL EKSTERNAL	Strengths	Weaknesses
Opportunities	<p>Strategi SO: mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada.</p>	<p>Strategi WO: mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada.</p>
Threats	<p>Strategi ST: mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T).</p>	<p>Strategi WO: mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T).</p>

Gambar. 1. Matrik SWOT

Dari hasil identifikasi dengan menggunakan matrik SWOT maka selanjutnya ditentukan metode pendampingan yang tepat berupa diagnosa awal sebagai berikut :

1. Kuadran 1, Kondisi ini dialami oleh Desa yang belum mendirikan BUMDesa
2. Kuadran 2, Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa tetapi belum melakukan Penyertaan Modal Desa
3. Kuadran 3, Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dan sudah melakukan Penyertaan Modal Desa, tetapi belum melakukan peredaran usaha
4. Kuadran 4, Kondisi ini dialami oleh Desa yang sudah mendirikan BUMDesa dan sudah melakukan Penyertaan Modal Desa, dan sudah melakukan peredaran usaha, akan tetapi bagaimana

keberlanjutannya. Pada saat ini, ketaatan aparat desa dalam mematuhi kebijakan mengenai pendirian BUMDesa masih belum optimal, banyaknya potensi desa yang belum dikembangkan menjadi kelayakan usaha, dapat dilihat sarana pendidikan bagi para pengurus dan pengelola BUM Desa tidak ada. Kerjasama kemitraan, forum-forum pertemuan dan sarana komunikasi belum ada. Belum memiliki jaringan luas baik jaringan pemasaran, produksi maupun birokrasi. Wadah untuk penyelesaian masalah bisnis belum ada. Kinerja pengelolaan BUMDesa belum dilakukan evaluasi. Tidak adanya penilaian dalam manajemen risiko.

HASIL KEGIATAN

Tujuan dilakukan pendampingan terhadap BUMDesa di Kabupaten Bogor adalah agar pengurus BUMDesa dapat memiliki sistem tata kelola organisasi dengan baik yang terdiri dari aspek bisnis dan aspek administrasi keuangan. Diharapkan dengan adanya pendampingan pada badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor mampu bermanfaat menggerakkan dinamika perekonomian desa dan sebagai agen pembangunan daerah serta menjadi pendorong terciptanya unit usaha kecil dan menengah. Berdasarkan hasil analisis dari metodologi yang dilakukan maka dilaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Percepatan pengembangan BUMDesa

Percepatan pengembangan BUMDesa untuk kwadran 1 dan kwadran 2 melalui melalui identifikasi potensi dan masalah untuk pengembangan kelembagaan, usaha dan pengembangan Sumber Daya Manusia BUMDesa. Hal ini dilakukan berupa pelatihan pengelolaan organisasi. Semua kegiatan dilakukan oleh dosen dan didampingi oleh mahasiswa.

Tindakan nyata dalam rangka penguatan daya saing badan usaha milik desa dalam menghadapi revolusi industri 4.0 melalui peningkatan kemampuan pegawai melalui pelatihan materi pengelolaan organisasi yang dilaksanakan untuk para ketua BUM Desa se - Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2020 bertempat di Kampung Budaya Sindang Barang Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Kegiatan ini diikuti oleh 9 orang perwakilan Bum Desa se kecamatan Tamansari. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama satu hari penuh. Kegiatan juga dihadiri oleh Kasie Ekbang kecamatan Tamansari kabupaten Bogor dan Pendamping Lokal Desa (PLD) Kecamatan Tamansari.



Gambar 2. Foto Kegiatan Pelatihan



Gambar 3. Foto Kegiatan Pelatihan

KESIMPULAN

Pendampingan BUMDesa di Kabupaten Bogor terlebih dahulu dilakukan Analisis dengan menggunakan analisis SWOT, analisis SWOT merupakan teknik yang berguna untuk memahami Kekuatan (*Strengths*) dan Kelemahan (*Weaknesses*) organisasi, dan untuk mengidentifikasi baik Peluang (*Opportunities*) yang terbuka untuk organisasi dan Ancaman (*Threats*) yang dihadapi oleh organisasi. Pada dasarnya analisis ini berusaha menemukan peluang baru, mengelola dan mengurangi ancaman organisasi. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka harus dilakukan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan dengan materi pengelolaan organisasi kepada para pengurus Bum Desa di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor. Hal ini dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam rangka penguatan BUMDesa dalam menghadapi era revolusi industri 4.0

Daftar Pustaka

1. Wiwoho, Jamal dan Munawar Kholil. (2012). "Pengelolaan dan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa". Makalah Review terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa

